

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DI KAWASAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR SWASTA DI AREA PASAR KM 5 PALEMBANG

Resy Okarini ¹⁾; Doris Febriyanti ²⁾; Isabella ³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang, Indonesia.

Email: 2018610002@students.uigm.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [04 Desember 2022]
Revised [31 Desember 2022]
Accepted [26 Januari 2023]

KEYWORDS

Implementation,
Management, Parking

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Implementasi pengelolaan tempat parkir di kawasan pasar tradisional KM 5. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Teori implementasi Van Meter dan Van Horn dengan beberapa indikator yaitu standar dan sasaran kebijakan, kinerja kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan, lingkungan ekonomi, sosial dan politik, sikap pelaksana. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa sasaran penerapan pengelolaan tempat parkir di wilayah pasar KM 5 ini ialah dari seluruh aspek yang ada di pasar KM 5 itu sendiri baik dari pengelola pasar yang ada di pasar tersebut, perumda pasar dan masyarakat itu sendiri. komunikasi antar lembaga sebagai bentuk komunikasi antara badan pelaksana untuk saat ini berupa kordinasi rutin yang dilakukan oleh pihak perumda pasar bersama pihak pengelola parkir yang ada di kawasan pasar KM 5 yang berupa rapat yang di adakan maksimal 2 sampai 3 bulan sekali. sikap pelaksana dalam menindak lanjuti pelanggaran dan hambatan yang terjadi saat ini sudah cukup tegas.

ABSTRACT

Implementation of parking lot management in the traditional market area of KM 5. The approach used in this research is to use descriptive research with qualitative research methods. The theory of implementation of Van Meter and Van Horn with several indicators, namely policy standards and objectives, policy performance, resources, communication between implementing agencies, agency characteristics, economic, social and political environment, implementing attitudes. The data collection method used was observation, interview, and documentation study. The results of the study indicate that the target of implementing parking lot management in the KM 5 market area is from all aspects of the KM 5 market itself, both from market managers in the market, perumda pasar and the community itself. Inter-institutional communication as a form of communication between implementing agencies for now is in the form of routine coordination carried out by the Perumda Pasar together with the parking manager in the KM 5 market area in the form of meetings held a maximum of every 2 to 3 months. The attitude of the implementers in following up on violations and obstacles that occur at this time is quite firm.

PENDAHULUAN

Pengelola parkir diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir, perlu diambil langkah yang tegas dan menindak para pelanggar kebijakan parkir. Dasar peraturan mengenai parkir adalah keputusan menteri perhubungan nomor : KM66 Tahun 1993 tentang fasilitas parkir untuk umum, dan keputusan menteri perhubungan Nomor : KM4 Tahun 1994 tentang tata cara parkir kendaraan bermotor di jalan, serta keputusan dirjen perhubungan darat Nomor 272/HK. 105/DRDJ/96 Tentang pedoman teknis penyelenggaraan parkir. (Wulandari 2015).

Pasar tradisional merupakan pasar di mana kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Sedangkan pasar swasta adalah pasar yang dikelola oleh pihak swasta yang telah diizinkan untuk dikelola oleh pemerintah daerah. (Kompas.com).

Menurut Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta

yang tempat usahanya berupa kios, toko, tenda, dan ios yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi, swadaya masyarakat yang proses jual belinya dilakukan lewat proses tawar-menawar. Dengan masing-masing pasar baik pasar tradisional maupun pasar swasta akan dikelola atau dikordinir oleh seorang penanggung jawab pasar atau yang biasa disebut PD Pasar. Kemudian tugas dari seorang PD Pasar ini ialah untuk mengawasi bagaimana jalannya pemungutan kontribusi parkir di pasar tersebut serta mengelola lahan parkir di pasar tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 menyatakan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Ada hal yang menarik mengenai masalah perpajakan ini, pertama: perpajakan di tepi jalan umum menjanjikan kontribusi yang cukup besar bagi daerah otonom. Kedua: perpajakan di tepi jalan umum di lain pihak dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Dalam perkembangan kota Palembang dari tahun ke tahun semakin banyak perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh dalam sektor pemilihan kendaraan kota Palembang yang makin meningkat di mana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktifitas masyarakat terutama di kota Palembang maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. (Khulaimi.2018)

Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah yang berkembang pesat dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki juga semakin meningkat, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan mengakibatkan kemacetan di ruas jalan. Kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah selaku pelayanan publik, untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam peraturan arus kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi warga Sumsel. Kota Palembang sebagai daerah dengan tingkat kepadatan arus kendaraan yang cukup tinggi sudah seharusnya menyediakan kawasan parkir khusus dan mengelola parkir di tepi jalan umum dengan baik dan benar, sehingga nantinya tidak menghambat arus lalu lintas jalan raya. Ada beberapa kawasan yang perlu mendapatkan penataan parkir secara serius, diantaranya adalah kawasan pasar KM5 dengan kondisi luas lahan parkir Pasar KM5 berukuran 40,00m x 24,00m, aktifitas berdagang jual/beli berjalan setiap harinya mulai jam 03:00 WIB – 16:00 WIB.

Serta tingkat arus kendaraan yang tinggi, di mana tidak diperkenankan untuk melakukan parkir di tepi jalan, sehingga harus diberikan area parkir secara khusus karena kawasan tersebut kerap menjadi sumber kemacetan. Kapasitas lahan parkir di kawasan pasar KM5 hanya bisa menampung maksimal 100 motor dan 50 mobil, sementara itu pengunjung yang datang untuk parkir sering kali melebihi dari lahan parkir yang ada. Yaitu berjumlah yang masuk sebanyak 155 motor dan 77 mobil. Hal ini lah yang membuat kemacetan terjadi di pinggiran jalan pasar KM5. Pengelolaan lokasi parkir di kawasan pasar tradisional dan pasar swasta tersebut timbul permasalahan dalam pengelolaan yang kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Pd Pasar Palembang Jaya. 2022).

Kondisi inilah yang membuat pemerintah Kota Palembang harus berinisiatif untuk mengatur sistem pengelolaan perpajakan yang lebih baik. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan di daerah pasar km5 yaitu sering terjadi parkir diluar batas tempat parkir yang sudah disediakan, parkir di pinggir jalan raya yang menyebabkan kemacetan. Selain itu, menurut data yang di peroleh melalui perusahaan umum daerah pasar Palembang jaya jumlah kontribusi pendapatan yang diperoleh dari pasar km5 Palembang berjumlah Rp. 310.000,- per hari atau sekitar Rp. 9.300.000,- per bulan. (Pd Pasar Palembang Jaya. 2022) Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian "Implementasi pengelolaan tempat parkir dikawasan pasar tradisional dan pasar swasta di area pasar KM5 Palembang".

LANDASAN TEORI

Konsep Implementasi

Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawakan hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keunggulan dan tentu saja penetapan siap saja yang

Tahapan Implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Suharno (2008: 187) Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh Negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan public pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan public (public service).

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan, menggunakan empat faktor kritis dari George C. Edwards III, yang terdiri dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Selain itu, Pengertian implementasi kebijakan selanjutnya dikemukakan oleh Jones dalam Febriyanti (2016), sebagai "*getting the job done and doing it*". Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana. Akan tetapi, dengan kesederhanaan rumusan seperti itu tidak berarti implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dapat dilakukan dengan mudah.

Teori Implementasi

Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Menurut (Sabatier, 1986: 21-48), implementasi merupakan persamaan fungsi dan kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Grindle (1980: 7), bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Teori atau model klasik yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dan Carl. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Teori implementasi yang dikemukakan oleh van meter dan van horn sendiri memiliki beberapa variabel, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun yang tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.
- b. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standard dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.
- c. Sumber daya yang menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah beberapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja yang baik. Evaluasi program/ kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.
- d. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjukan kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan.
- e. Karakteristik badan pelaksana, menunjukan seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjukkan bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
- g. Sikap pelaksana, menunjukkan bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsive terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

Definisi Pengelolaan

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan. Hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama.

Menurut Wardoyo, pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Harsoyo, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Beberapa ahli telah memaparkan mengenai definisi pengelolaan sebagai berikut :

- a. Menurut Prajudi, pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan tertentu.
- b. Menurut Balderton, mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisirkan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.
- c. Menurut Moekijat, mengemukakan bahwa pengelolaan juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.
- d. Menurut Soekanto, pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.
- e. Menurut Hamalik, istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton yang menjelaskan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengerahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya. (Sari. 2017).

Definisi Tempat Parkir

Ahli Kebijakan transportasi dengan spesialis parkir telah mendefinisikan parkir yaitu (Herzog, 2012: 39), definisi tersebut dapat diartikan bahwa parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti dengan memanfaatkan prasarana transportasi dalam jangka waktu tertentu, sehingga dilakukan pengaturan dengan jaringan transportasi. Tidak jauh berbeda dengan definisi parkir berikut parkir adalah ketertiban dan penghentian penyelesaian kendaraan dengan menggunakan sarana angkutan dalam batas waktu tertentu, sehingga diperlukan sarana khusus dengan harus memperhitungkan biaya langsung untuk kepentingan tindakan khusus. (Hosking: 2011) Kedua definisi parkir diatas, telah memberikan kejelasan bahwa yang dimaksud dengan parkir dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.
2. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara.
3. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Sementara itu, pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Di mana menurut Sugiono (2015) pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Lebih lanjut dikemukakan oleh Creswell (2016) penelitian

kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penelitian kualitatif di tuju untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar melalui pengalaman, laporan yang sebenar-benarnya dan catatan percakapan yang aktual. Penelitian kualitatif pun juga memiliki ciri nya sendiri dimana seperti yang dijelaskan oleh Finlay dalam Gunawan (2016) penelitian kualitatif memiliki lima ciri yaitu

1. peran penelitian dalam membentuk pengetahuan artinya peran ini dilakukan melalui proses pengumpulan, pemilihan dan interpretasi data.
2. Arti penting hubungan peneliti dengan pihak lain yaitu peneliti dipengaruhi oleh lingkungan sosial, historis dan kultural ketika riset dilakukan,
3. Penelitian bersifat inductive, exploratory, dan hypothesis- generating dimana penelitian bertujuan menginvestigas dan memahami sosial world bukannya memprediksi perilaku.
4. Peranan makna dan interpretasi artinya penelitian ini berusaha mengintepretasikan fenomena dari kacamata perilaku berdasarkan pada interpretasi mereka terhadap fenomena tersebut.
5. Temuan sangat kompleks, rinci dan komprehensif ialah penelitian didasarkan pada deksripsi yang jelas dan detail karena menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana.

Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan analisis dokumen, observasi dan wawancara. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut Menurut poerwandari dalam gunawan (2016) observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Pengertian dokumentasi seringkali diartikan dalam 2 pengertian yaitu berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak dan peninggalan terlukis serta di peruntukan bagi surat resmi, surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang hibah, konsesi dan lainnya. Pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atau jenis sumber apa pun baik iu yang bersifat tulis, lisan, gambaran dan arkeologis.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Gunawan(2016). analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan dan bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang digunakan dalam menganalisis data yaitu reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan dilakukan selama dan sesudah pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Dan Sasaran Kebijakan

Pemahaman tentang standar dan sasaran untuk tujuan kebijakan yaitu sangat penting. Implementasi kebijakan biasanya akan gagal apabila para pelaksana, sepenuhnya kurang menyadari terhadap standar dan sasaran tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan sikap terhadap para pelaksana. Arah sikap para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan suatu hal yang "crucial".

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber maka mendapat garis besar penerapan pengelolaan parkir di wilayah pasar KM 5 saat ini berjalan dengan lancar dan baik-baik saja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berjalan saat ini. Hal ini di lihat berdasarkan aktivitas kegiatan pengguna pasar baik pedagang, tenaga parkir mau pun pengunjung pasar yang ramai dan tidak ada masalah mengenai parkir dan lainnya. Serta arahan dari perumda juga masih terus dilakukan guna mengingatkan selalu bagi para pengelola pasar untuk menerapkan pengelolaan tempat parkir ini dengan sebaik mungkin.

Selanjutnya, yang menjadi sasaran penerapan pengelolaan tempat parkir di wilayah pasar KM 5 ini ialah dari seluruh aspek yang ada di pasar KM 5 itu sendiri baik dari pengelola pasar yang ada di pasar tersebut, perumda pasar dan masyarakat itu sendiri. Sehingga jika seluruh aspek telah berjalan dengan baik maka sasaran yang di tuju pada pengelolaan pasar KM 5 ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran pengelolaan pasar KM 5 tersebut.

Dari aspek pemahaman informan terhadap indikator standar dan sasaran kebijakan yang disampaikan dalam wawancara terkait pengelolaan parkir di pasar KM 5 telah berjalan dengan baik dan informan telah mampu memahami dengan baik bagaimana pengelolaan tempat parkir di pasar tersebut dengan baik tujuan dan maksud dari pengelolaan ini. Hal ini di bukti kan dengan pendapat informan penelitian pada wawancara yang mengatakan

“Yang menjadi sasarannya yang pertama pengelola parkir yang di tunjuk oleh perumda pasar, juru parkir karena memang mereka yang diatur oleh perwali no 19 itu, termasuk juga yang parkir karena itu ada tarif nya disitu bahwa kalau motor itu Rp.1000,- , kalau mobil Rp.2000,- itu di atur di Perwali juga, terus yang juru parkir tadi tugas nya ialah mengutip parkir itu, terus pengelola nya menunjuk siapa yang menjadi juru parkir di situ terus mereka berkewajiban untuk menyetorkan ke perumda pasar dan menata parkir disitu agar tidak macet dan supaya wilayah parkir disitu bersih nyaman. Itu yang menjadi sasarannya.” (Wawancara Hari Senin, 30 Mei 2022).

Kinerja Kebijakan

Kinerja kebijakan merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui apakah pengelolaan parkir di pasar KM 5 telah berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang akan di tujuh. Selain itu melalui kinerja kebijakan bermaksud untuk mengetahui bagaimana hasil dari permasalahan yang ada baik sebelum dan setelah pengelolaan ini di lakukan oleh instansi yang bersangkutan dalam hal ini ialah perumda pasar, kepala pasar KM 5, juru parkir dan masyarakat yang bersangkutan

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber dapat di analisa bahwa hasil pengelolaan tempat parkir di pasar KM 5 untuk saat ini sudah berjalan dengan lancar dan di rasa sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat di lihat dari penerapan lokasi parkir yang sudah tertata dan aman dan tidak ada nya kasus yang menyangkut per parkir seperti kehilangan dan lain sebagainya. Namun untuk masalah kemacetan yang ada hal tersebut di rasa belum dapat di atasi dengan optimal di lihat dari beberapa penurutan informan yang mengatakan bawah kemacetan yang masih sering ada hal ini di karena kan beberapa faktor salah satu nya yaitu beberapa mobil yang berhenti di bahu jalan, dan banyak nya volume kendaraan yang lewat di daerah tersebut dan ingin memutar arah di putaran yang terdapat di depan pasar KM 5. selain itu kemacetan ini pun di rasa bukan seutuh nya tanggung jawab dari kepala pasar untuk menyelesaikannya di karena menurut nya parkir yang di sediakan juga tidak sedikit dan sudah tertata di satu tepat yaitu di halaman pasar KM 5 jadi tidak ada lagi yang memakan parkir di bahu jalan.

Kemacetan pun di rasa ada karena volume kendaran yang padat baik yang hanya lewat di pasar KM 5 atau pun pengunjung yang keluar masuk ke dalam pasar KM 5. Berdasarkan beberapa hasil wawancara mendapatkan hasil apakah penerapan pengelolaan parkir di pasar KM 5 ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan sasaran kebijakan. Beberapa informan pun merasa dengan adanya pengelolaan tempat parkir ini sudah sesuai dengan tujuan awalan pengelolaan ini yaitu agar parkir di kawasan KM 5 ini lebih tertata dan rapih lagi, serta dapat mengatasi beberapa permasalahan seperti kemacetan dan keamanan yang menjadi fokus utama dari adanya pengelolaan tempat parkir ini.

Pada indikator ini peneliti dapat menganalisa bahwa kinerja kebijakan yang ada di antara perumda pasar, kepala pasar, juru parkir, dan masyarakat di lingkungan pasar KM 5 saat ini sudah berjalan dengan baik di lihat dari pengelolaan parkir di kawasan pasar KM 5 yang sudah berjalan dengan baik dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya di kawasan pasar KM 5. Namun, Selain itu permasalahan yang ada di kawasan pasar KM 5 pun di rasa masih ada, permasalahan seperti kemacetan pun masih sering terjadi hal ini di karena kan oleh beberapa sebab seperti volume kendaraan yang melintas di depan pasar KM 5 yang cukup padat serta volume parkir yang ada di area parkir di kawasan pasar KM 5 juga terbilang masih sedikit hal ini dapat di lihat dari luas area parkir yang ada di pasar KM 5 yaitu seluas 40x24 meter di rasa masih kurang cukup luas di area parkir mobil, hal ini membuat terkadang banyak nya mobil yang berhenti atau terkadang memarkirkan mobilnya di bahu jalan.

Hal ini merupakan salah satu faktor dari kemacetan yang sering terjadi di area pasar KM 5 tersebut. Untuk itu perumda pasar seharusnya lebih meluaskan area parkir yang ada di pasar KM 5 tersebut atau menambah tempat parkir khusus mobil yang ada di area pasar KM 5 tersebut. Selain itu, perhatian lain dari pemerintah juga perlu di lakukan guna mengatur lalu lintas yang melewati pasar

KM 5 tersebut sehingga volume kendaraan yang ada bisa di atur dengan sedemikian rupa agar tidak menjadi kemacetan.

Sumber Daya

Sumber Daya yang dimaksud meliputi perumda pasar dan kepala pasar serta juru parkir yang memadai dan tanggung jawab yang baik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Wewenang dan fasilitas untuk melaksanakan tugas-tugas nya. Sumber daya manusia yang membantu untuk memperbaiki kualitas maupun kuantitas dari program dan pengelolaan yang dilaksanakan. Sumber daya. Pada penelitian kali ini peneliti ingin mengetahui bagaimana Indikator sumber daya dapat mempengaruhi implementasi pengelolaan tempat parkir di kawasan pasar KM 5.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di analisa bahwa keterkaitan antara kerja sama Sumber daya manusia internal seperti kepala pasar dan juru parkir bersama pihak eksternal saat ini belum ada, keterkaitan antara pihak internal dan eksternal saat ini hanya di sebagai koordinator yang mengawasi penerapan parkir di pasar KM 5 sebaik mungkin, jadi, tugas dari pihak eksternal saat ini hanya ketika terdapat permasalahan seperti parkir liar atau parkir sembarangan yang ada di pasar KM 5 lalu di tindak lanjuti oleh pihak eksternal tersebut. Pengetahuan masyarakat akan hal ini pun terbilang tidak ada dan masyarakat hanya dapat menilai dari sudut pandang yang mereka rasakan sehari-hari saja.

Selanjutnya finansial yang di dapatkan dalam proses pengelolaan parkir di kawasan pasar KM5 ini berupa pembangunan area parkir dan bantuan seperti atribut parkir berupa jaket dan lain-lainnya. Untuk dana yang masuk secara tunai pada proses pengelolaan parkir di pasar KM 5 ini sendiri belum tersedia atau tidak langsung di berikan kepada pihak pengelola pasar dalam hal ini yaitu PD Pasar dan Kepala Pasar, namun bantuan yang di berikan pemerintah seperti pembangunan dan bantuan alat kelengkapan parkir. Selain itu, bantuan pembangunan dan bantuan alat kelengkapan parkir tersebut di biayai oleh pemerintah kota Palembang, dalam hal ini artinya dana yang di keluarkan untuk biaya tersebut merupakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palembang atau APBD Kota Palembang. Yang di anggarkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan pasar pertahunnya. Selain itu tiada biaya lainnya yang di keluarkan untuk kebutuhan pengelolaan parkir di kawasan pasar KM 5.

Sarana dan prasarana yang di berikan oleh perumda pasar kepada pengeloa parkir di kawasan pasar KM 5 yaitu dalam hal ini kepala pasar dan juru parkir sudah ada, yaitu berupa surat tugas atau surat keputusan yang bertujuan agar juru parkir yang bertugas dalam pengelolaan parkir di pasar tersebut memang tercatat dengan jelas sesuai dengan surat tugas yang ada. Sehingga dapat di katakana juru parkir yang adapun resmi. Selain itu fasilitas yang di berikan perumda pasar juga berupa rompi parkir dan tanda pengenal bagi seluruh juru parkir yang bertugas baik pada jadwal pagi dan sore hari di kawasan pasar KM 5, rompi ini bertujuan untuk memberikan pengenal bahwasannya juru parkir yang tersedia di kawasan tersebut merupakan juru parkir yang ditugaskan oleh pemerintah, bukan juru parkir jalanan yang tidak tercatat namanya di dalam pengelolaan tempat parkir.

Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Menurut hasil wawancara bersama beberapa narasumber di atas maka dapat di gambarkan bahwa bentuk komunikasi antara badan pelaksana untuk saat ini berupa kordinasi rutin yang dilakukan oleh pihak perumda pasar bersama pihak pengelola parkir yang ada di kawasan pasar KM 5 yang berupa rapat yang di adakan maksimal 2 sampai 3 bulan sekali. Dan rapat tidak terjadwal lainnya untuk membahas permasalahan yang ada dalam pengelolaan parkir di kawasan pasar KM 5 itu sendiri. Untuk rapat ini dilaksanakan di tempat Perumda pasar Palembang Jaya, dengan mekanisme bahwa perumda pasar yang memanggil pihak pengelola parkir yang ada di pasar KM 5. Biasanya hasil yang didapatkan dalam rapat ini berupa program atau cara untuk mengelola parkir agar lebih baik lagi. Serta permasalahan-permasalahan yang muncul karena parkir tersebut yang akan di selesaikan pada rapat tersebut.

Hal ini di bukti kan dalam wawancara bersama, Ibu Seri Banun, SH selaku kepala pengelolan pasar tradisional menyebutkan dalam wawancara pada hari Senin, 30 Mei 2022 bahwa

"Iyo jelas, jadi kita tetap ado rapat-rapat berkenaan dengan misalnya biasanya penataan keamanan ya itu karena yang namanya parkir itu kan rentan masalah keamanan nyo itu kito pantau dengan rapat terus. Biasanya rapat itu di perumda pasar kalo rutin nyo itu sebenarnya itu 3 bulan sekali, kecuali kalo memang ada hal-hal yang memang terjadi di lapangan umpamanya ada apo. Ka biaso nyo di lahan-lahan parkir tu ado bae sebenernyo masalah. Umpama nyo ado kejadian nanti kita panggil itu merupakan rapat yang di tidak

terjadwal. Intinyo rapat 3 bulan sekali di perumda pasar dan kalo ado kejadian atau pun keterangan yang dibutuhkan perumda pasar memangil pengelola parkir km 5 untuk di minta keterangan”

Karakteristik Badan Pelaksana

Dalam indikator ini karakteristik badan pelaksana merupakan wujud seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi. Dalam hal ini karakteristik yang ada dalam pengelolaan parkir di kawasan pasar KM 5 berupa bagaimana standar operasional pengelolaan parkir tersebut. Serta bagaimana pembagian tugas dan wewenang dalam proses pengelolaan tempat Parkir di kawasan pasar KM 5 tersebut. atas maka dapat di analisa bahwa pembagian standar SOP dalam pengelolaan parkir di kawasan pasar KM 5 serta pembagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan ini berwujud dengan pembagian jam kerja dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu jam 3 subuh hingga jam 12 siang dan ada yang dari jam 12 siang sampai jam 4 sore tergantung dari jam kerja yang di susun oleh kepala atau koordinator parkir tersebut. dan khusus kepala pasar tersebut bertugas melaporkan hasil pendapatan atau retrebusi kepada perumda pasar KM 5.

Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan salah satu respon baik dari perumda pasar, pengelola pasar dan masyarakat yang ada di sekitar pasar KM 5 itu sendiri. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik sangat mempengaruhi bagaimana penerapan implementasi dari suatu program yang di jalan kan akan berhasil hal ini dikarenakan dampak dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik sangat dirasakan. Semakin baik dampak lingkungan sosial, ekonomi yang di rasakan maka akan semakin baik pula program yang di jalan, namun sebaliknya, jika semakin buruk dampak lingkungan sosial, ekonomi dan politik maka kebijakan yang dijalankan akan semakin buruk di rasakan. Masyarakat yang di maksudkan dalam indikator ini ialah seluruh masyarakat yang ada di lingkungan pasar KM 5 baik itu pengelola parkir, juru parkir, pedagang dan masyarakat yang berbelanja di dalam pasar tersebut.

Maka dari itu, dapat di gambarkan bahwa peranan sosial, ekonomi dan politik yang ada dalam pengelolaan parkir di kawasan pasar KM 5 ini untuk saat ini belum tersedia. Di lihat dari penuturan para narasumber yang mengatakan bahwa dari sisi politik pengelolaan parkir di pasar KM 5 ini untuk saat ini belum tersedia dan biasanya peran politik yang ada di kawasan pasar KM 5 ini dapat di lihat dari waktu menjelang dan mendekati pemilu nanti.

Berdasarkan indikator ini peneliti mendapatkan beberapa garis besar yaitu lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam pengelolaan parkir di kawasan pasar KM 5 ini untuk saat ini belum terlalu dampak di lihat baik secara signifikan. Dampak lingkungan sosial diberlakukannya pengelolaan parkir ini sudah sangat baik di lihat dari respon dan tanggapan masyarakat dalam mempersepsikan pengelolan parkir ini sudah sangat positif dan menyambut baik program yang akan di berlakukan dalam pengelolaan parkir di kawasan pasar KM 5 ini. Selain itu pada keadaan ekonomi dan politik peneliti mendapatkan gambaran bahawa peran ekonomi dan politik di dalam pengelolaan parkir ini belum terlalu jelas dirasakan karena beberapa kebiasaan seperti tidak ada nya dampak yang di rasakan oleh pengeleloan parkir di kawasan pasar KM 5 ini sendiri.

Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variable penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan dapat menjadi bagian dari sikap pelaksana ini. Dalam penelitian ini sikap pelaksana di maksud kan bagaimana sikap atau tindakan yang di ambil oleh perumda pasar dalam mengimplementasi kan pengelolaan parkir di kawasan pasar KM 5 dengan sebaik- baiknya dan sesuai dengan tujuan yang akan di capai melalui pengelolan parkir itu sendiri. Selain itu sikap pelaksana juga dapat di lihat sebagai apa saja tindakan yang dilakukan pengelola parkir apa bila menemukan permasalahan yang terjadi dalam melakukan pengelolan parkir di pasar tersebut.

Dapat di analisa bahwa sikap pelaksana dalam menindak lanjuti pelanggaran dan hambatan yang terjadi dalam pengelolaan parkir di kawasan pasar KM 5 saat ini sudah cukup tegas, akan tetapi stagement yang di berikan oleh pihak perumda dan kepala pasar saat wawancara masih ada kesenjangan di mana menurut perumda proses atau cara mereka dalam menangani permasalahan tersebut dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi berkala sehingga pedagang di himbau untuk masuk ke dalam pasar serta adanya program gratis dari pemerintah. Sementara itu stagement dari kepala pasar menyebutkan bahwa untuk menindak lanjuti hal ini dilakukan dengan cara pelarangan untuk berjualan tersebut dan pedagang di larang untuk masuk ke area tersebut.

Dari sini lah dapat di nilai bahwa dalam kesenjangan ini proses pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan oleh perumda pasar di rasa belum efektif karena dalam hal ini di rasa belum adanya pembinaan dalam jangka berkala sehingga masih jarang di ingat dan di lakukan oleh pihak pengelola pasar. Maka dari itu perlu adanya program pembinaan atau pun sosialisasi yang sesuai dengan program tersebut dan jelas dilakukan secara berkala sehingga seluruh pedagang dan pengelola parkir juga mengetahui program pembinaan dan sosialisasi tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukan bahwa sasaran penerapan pengelolaan tempat parkir di wilayah pasar KM 5 ini ialah dari seluruh aspek yang ada di pasar KM 5 itu sendiri baik dari pengelola pasar yang ada di pasar tersebut, perumda pasar dan masyarakat itu sendiri. komunikasi antar lembaga menunjukkan hasil wawancara bahwa bentuk komunikasi antara badan pelaksana untuk saat ini berupa kordinasi rutin yang dilakukan oleh pihak perumda pasar bersama pihak pengelola parkir yang ada di kawasan pasar KM 5 yang berupa rapat yang di adakan maksimal 2 sampai 3 bulan sekali. sikap pelaksana dalam menindak lanjuti pelanggaran dan hambatan yang terjadi dalam pengelolaan parkir di kawasan pasar KM 5 saat ini sudah cukup tegas, akan tetapi stagement yang di berikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, selanjutnya saran yang dapat di berikan oleh peneliti dalam Implementasi pengelolaan kawasan parkir di area pasar KM 5 Palembang agar berjalan dengan optimal yaitu

1. Perlu adanya komunikasi dan kerjasama yang jelas antar lembaga yang terkait seperti perumda pasar dengan pengelola pasar di pasar KM 5. sehingga kerjasama dalam pengelolaan parkir ini dapat berjalan dengan lancar.
2. Perlu adanya kerjasama eksternal bersama instansi terkait seperti polisi dan pol- pp dalam menangani permasalahan kemacetan yang ada di depan kawasan pasar KM 5 agar tidak mengganggu mekanisme parkir pasar KM 5 itu sendiri.
3. Perlu adanya program pembinaan dan sosialisasi yang jelas dan berkala dalam penanganan pelanggaran yang di lakukan oleh pedagang yang berjualan sembarangan dan memakai area parkir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Creswell, j.w. (2016). Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Grindle, MS (2017). Politik dan implementasi kebijakan di Dunia Ketiga (Vol. 4880). Pers Universitas Princeton.
- Gunawan, imam. (2016). Metode penelitian kualitatif : Teori dan praktik. `jakarta : Bumi aksara
- Sugiyono. (2015). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d. Bandung Penerbit alfabeta.
- Syaukani, dkk. 2004. Otonomi Dalam Kesatuan. Yogya Pustaka: Yogyakarta.

Skripsi, Tesis and Disertasi

- Khulaimi, M. S. (2018). Analisis Parkir Kendaraan Bermotor Di Bahu Jalan Alun-Alun Bojonegoro Perspektif Hukum Bisnis Islam (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro).
- Sari, d. W. (2017). Strategi dinas perhubungan dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kota malang (doctoral dissertation, university of muhammadiyah Malang)
- Suharno. 2008. Program Keluarga Harapan (PKH) memotongmatarantai kemiskinan anakbangsa. Pendidikan PascaSarjana Spesialis-1. PekerjaSosial STKS Bandung

Aturan Perundang-Undangan :

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 22 Tahun 2009. Tentang. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Journal article

Wulandari,S.(2015).Pengelolaan parkir tepi jalan oleh UPTD pengelolaan parkir pada dinas perhubungan dikota samarinda. *Jurnal administrasi Negara*,3(1.)35-46.

Febriyanti, D., & Isabella, I. (2019). Implementasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Di Luar Negeri Pada Tahap Pra Penempatan (Studi Kasus Tki Kota Palembang). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* , 1 (2).

Harsoyo, B., Yananto, A., Atoillah, I., & Nugroho, A. (2015). Rekomendasi Pengelolaan Sumber Daya Air Waduk/Danau Plta Di Indonesia Melalui Pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca. *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca* , 16 (2), 47-54.

Isabella, I. (2019). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Pada Sekolah Menengah Atas Di Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* , 1 (1).

Purwantini, S., Rusdianti, E., & Wardoyo, P. (2017). Kajian Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* , 18 (1), 133-145.

Sabatier, P. (1986). Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up untuk Penelitian Implementasi: Analisis Kritis dan Sintesis yang Disarankan. *Jurnal Kebijakan Publik*,6 (1), 21-48. doi:10.1017/S0143814 X00003846

Artikal/ Berita Internet

Herzog, Kuzmyak, Jr. 2012.Parking Management and Supply in Traveler Response to Transportation System Changes. Cooperative Research and DevolpomenProgram.http://www.scoland.go.uctrans_vtpe.oreg.transpotarti_learning.net/doct.co m/shsID=4729772-62. Diakses tanggal 18 Mei 2022.

Hosking, Pratt. R. 2011. Ability to the Public Tranport System to Cope With Targets for Increase In Passanger Numbers. Report to Scotish Executive, Transpor Division 1.VictoriaQuay, Edinburgh,Scotland:GopinathPublish.http://www.itdp.org.doc_ITDP_US_Parking_Report.last/23???200211. Di akses pada tanggal 22 Mei 2022

Kompas.Com 2020. Pasar Tradisional ; Pengertian, citi dan jenisnya, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/28/060000169/pasar-tradisional- pengertian-ciri-dan-jenisnya?page=all> di akses pada tanggal 17 mei 2022

Wawancara

Banun, SH., Seri. 2022 Palembang, 20 Mei 2022